

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder theory dipelopori oleh R. Edward Freeman melalui *strategic management a stakeholder approach* yang diterbitkan pada tahun 1984. Freeman menyatakan bahwa “kerangka konseptual baru diperlukan” sebagai dasar pengembangan pendekatan *stakeholder* dalam manajemen strategis. Lebih lanjut, teori ini memperluas konsep manajemen strategis dengan mendefinisikan *stakeholder* sebagai “setiap kelompok atau individu yang terpengaruh oleh atau dapat memengaruhi pencapaian tujuan suatu organisasi.” Oleh karena itu, pendekatan *stakeholder* bertujuan untuk mengelola berbagai kelompok dan hubungan yang terlibat secara strategis dalam pencapaian tujuan organisasi. Definisi awal *stakeholder* menekankan pentingnya pemahaman manajemen terhadap berbagai pihak yang berkepentingan dalam perusahaan. Hal ini tercermin dari pandangan bahwa “para manajer perlu memahami kekhawatiran para pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, pemberi pinjaman, dan masyarakat, agar dapat mengembangkan tujuan yang akan didukung oleh para pemangku kepentingan” serta bahwa “Dukungan ini diperlukan untuk kesuksesan jangka panjang.” Selain itu, manajemen juga didorong untuk “Secara aktif menjajaki hubungannya dengan semua pemangku kepentingan untuk mengembangkan strategi bisnis” (Freeman et al., 1984).

Pendekatan *stakeholder* menekankan bahwa tujuan utama perusahaan tidak semata-mata berorientasi pada kepentingan pemegang saham, melainkan pada keberlangsungan perusahaan secara keseluruhan. Hal ini tercermin dari pandangan R. Edward Freeman yang menyatakan bahwa tujuan organisasi adalah “*the achievement of an organization's objectives*” yang artinya keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan cara yang tetap menjaga keseimbangan kepentingan seluruh stakeholder. Hal ini menjadi

bagian dari upaya mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Dalam mencapai hal tersebut, manajemen perlu memperoleh dukungan dari berbagai pihak, karena *“to successfully change course, management must have the support of those who can affect the firm and understand how the firm will affect others.”* yang artinya untuk dapat melakukan perubahan arah secara efektif, manajemen perlu memperoleh dukungan dari pihak-pihak yang memiliki pengaruh terhadap perusahaan, serta memahami bagaimana keputusan dan aktivitas perusahaan dapat berdampak terhadap pihak-pihak tersebut (Freeman et al., 1984).

Menurut Edward Freeman et al (1984), pendekatan *stakeholder* menolak fokus tunggal pada pemegang saham, sebagaimana dinyatakan bahwa *“a stakeholder approach rejects the very idea of maximizing a single objective function as a useful way of thinking about management strategy”* yang artinya Pendekatan stakeholder menolak gagasan bahwa strategi manajemen seharusnya hanya berfokus pada satu tujuan utama, seperti maksimalisasi laba, melainkan menekankan pentingnya mempertimbangkan berbagai kepentingan *stakeholder* secara seimbang dalam pengambilan keputusan. Melainkan menekankan pentingnya menyeimbangkan berbagai kepentingan melalui *“balancing and integrating multiple relationships and multiple objectives.”* Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan harus menyeimbangkan dan menggabungkan berbagai hubungan serta tujuan yang berasal dari banyak *stakeholder*.

Stakeholder theory memiliki tiga aspek utama yang menjadi dasar pengembangannya. Menurut Donaldson & Preston (1995) dinyatakan bahwa *“the stakeholder theory has been advanced and justified in the management literature on the basis of its descriptive accuracy, instrumental power, and normative validity.”* Ketiga aspek tersebut saling berkaitan, di mana *“the three aspects of stakeholder theory are mutually supportive”* yang menyatakan bahwa ketiga aspek dalam stakeholder theory saling mendukung satu sama lain.

1. “Aspek deskriptif (*descriptive*).”

“*The stakeholder theory is unarguably descriptive. It presents a model describing what the corporation is.*” Hal tersebut menunjukkan bahwa *stakeholder theory* berfungsi untuk menjelaskan kondisi nyata perusahaan, yaitu bagaimana perusahaan dipahami sebagai suatu entitas yang melibatkan berbagai pihak dengan kepentingan yang berbeda. Dalam hal ini, perusahaan dipahami sebagai “*a constellation of cooperative and competitive interests possessing intrinsic value.*” Oleh karena itu, aspek deskriptif dalam teori ini berfungsi untuk menggambarkan realitas perusahaan yang melibatkan berbagai kepentingan *stakeholder*.

2. Aspek Instrumental (*Instrumental*)

Aspek instrumental dalam *stakeholder theory* menjelaskan hubungan antara penerapan prinsip *stakeholder* dengan pencapaian kinerja perusahaan. Dalam hal ini, teori digunakan untuk “*identify the connections... between stakeholder management and the achievement of traditional corporate objectives (e.g., profitability, growth)*” yang artinya menjelaskan apakah manajemen *stakeholder* memiliki hubungan dengan keberhasilan perusahaan dalam mencapai kinerja keuangan dan pertumbuhan. Aspek ini menerapkan bahwa prinsip *stakeholder* terbukti mampu mendukung pencapaian kinerja perusahaan secara efektif.

3. Aspek normatif (*normative*)

Aspek normatif (*normative*) dalam Stakeholder Theory berkaitan dengan nilai moral dan pedoman etis dalam pengelolaan perusahaan. Dalam hal ini, teori digunakan untuk “*interpret the function of the corporation, including the identification of moral or philosophical guidelines for the operation and management of corporations.*” Hal tersebut menyatakan bahwa fungsi perusahaan adalah mendapatkan keuntungan tetapi harus ada moral didalamnya. Selain itu, ditegaskan bahwa “*normative concerns dominated the classic stakeholder theory statements from the beginning,*” yang menunjukkan bahwa aspek moral menjadi dasar utama dalam pendekatan *stakeholder*.

Berikut adalah pembagian jenis *stakeholder* yaitu primer dan sekunder yang bersifat sederhana dan jelas” (Clarkson, 1995):.

1. *Primary Stakeholder (Stakeholder Utama)*

“Kelompok stakeholder primer adalah pihak-pihak yang keberlanjutan partisipasinya sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Kelompok ini umumnya terdiri dari pemegang saham dan investor, karyawan, pelanggan, serta pemasok, bersama dengan kelompok stakeholder publik seperti pemerintah dan masyarakat.”

2. *Secondary Stakeholder (Stakeholder Tambahan)*

“Kelompok stakeholder sekunder adalah pihak-pihak yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh perusahaan, namun tidak terlibat dalam transaksi langsung dengan perusahaan dan tidak menentukan keberlangsungan hidupnya. Media dan berbagai kelompok kepentingan khusus termasuk dalam kategori *stakeholder* sekunder.”

Menurut Mitchell et al (1997), “klasifikasi *stakeholder* dapat dilakukan berdasarkan kepemilikan atribut tertentu, yaitu kekuasaan dalam memengaruhi perusahaan, legitimasi hubungan dengan perusahaan, serta urgensi klaim yang diajukan kepada perusahaan.”

1. *Power (Kekuasaan)*

Kekuasaan dalam konteks stakeholder dapat dipahami sebagai kemampuan suatu pihak untuk memengaruhi pihak lain dalam suatu hubungan sosial. Hal ini sejalan dengan definisi bahwa kekuasaan merupakan “*the probability that one actor within a social relationship would be in a position to carry out his own will despite resistance*” yang artinya probabilitas suatu pihak dalam suatu hubungan sosial berada pada posisi untuk menjalankan kehendaknya meskipun menghadapi perlawanan. Serta “*a relationship among social actors in which one social actor, A, can get another social actor, B, to do something that B would not otherwise have done.*” Dengan demikian, kekuasaan mencerminkan “*the ability of those who possess power to bring about the outcomes they desire*” yang maknanya adalah pihak yang

memiliki kekuasaan mampu mengendalikan hasil sesuai keinginannya. Dalam konteks organisasi, kekuasaan tersebut dapat dijalankan melalui berbagai sumber, yaitu “*coercive power*,” “*utilitarian power*,” dan “*normative power*,” yang masing-masing berbasis pada kekuatan fisik, sumber daya material atau finansial, dan pengaruh simbolis.

2. *Legitimacy* (Legitimasi)

Legitimasi dalam konteks *stakeholder* berkaitan dengan tindakan atau peran suatu pihak yang dinilai oleh masyarakat berdasarkan norma dan nilai yang berlaku. Hal ini tercermin dari pengertian bahwa legitimasi “*loosely referring to socially accepted and expected structures or behaviors*” yang artinya secara umum mengacu pada struktur atau perilaku yang dianggap sesuai, diterima, dan diharapkan dalam norma sosial yang berlaku. Selain itu, legitimasi sering dikaitkan dengan kekuasaan, di mana penggunaan kekuasaan harus sesuai dengan norma sosial, Mitchell et al (1997) menyatakan bahwa “*those who do not use power in a manner which society considers responsible will tend to lose it*” yang artinya “pihak yang menggunakan kekuasaan tidak sesuai dengan norma dan tanggung jawab sosial berpotensi kehilangan legitimasi, sehingga kekuasaan yang dimiliki dapat berkurang atau hilang.”

3. *Urgency* (Urgensi)

Urgensi merupakan salah satu klasifikasi dalam *stakeholder theory* yang bersifat dinamis dan berkaitan dengan tingkat perhatian yang harus segera diberikan terhadap klaim *stakeholder*. Hal ini dijelaskan bahwa “urgensi didefinisikan sebagai sesuatu yang memerlukan perhatian segera atau bersifat mendesak” serta bahwa “urgensi hanya ada ketika dua kondisi terpenuhi.” Kondisi tersebut meliputi “*time sensitivity*” dan “*criticality*,” yaitu tingkat ketidakmampuan *stakeholder* untuk menunda respons serta tingkat kepentingan klaim tersebut.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Menurut Pastoriza et al (2008), “*stewardship theory is a new perspective to understand the existing relationships between ownership and management of the company.*” Hal ini menyatakan bahwa “teori *stewardship* merupakan suatu perspektif baru yang digunakan untuk memahami hubungan yang telah ada antara pemilik perusahaan (*ownership*) dan pihak manajemen (*management*).” Lalu, “*stewardship Theory has been framed as the organizational behavior counterweight to rational action theories of management.*” Dengan demikian “teori *stewardship* dikembangkan sebagai teori yang menyeimbangkan pandangan teori manajemen berbasis tindakan rasional, dengan menekankan bahwa manajer tidak selalu bertindak demi kepentingan pribadi, tetapi dapat bertindak sebagai pengelola yang mengutamakan kepentingan organisasi.” Pastoriza et al (2008) menjelaskan bahwa "tujuan utama teori *stewardship* adalah berfokus pada pencarian mekanisme tata kelola yang paling efektif dan identifikasi keselarasan kepentingan." “Asumsi utama *stewardship theory* adalah bahwa perilaku manajemen selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan, sehingga manajemen bertindak sebagai pihak yang dapat dipercaya untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diambil manajemen berorientasi pada keberhasilan dan keberlanjutan perusahaan dalam jangka panjang, bukan semata-mata untuk kepentingan pribadi”(Pastoriza et al., 2008).

“Dalam *stewardship theory*, hubungan antara manajer dan pemegang saham dijelaskan sebagai hubungan yang harmonis dan selaras, di mana manajer bertindak sebagai pelayan (*steward*) yang tujuannya identik dengan tujuan pemilik perusahaan. Hubungan ini bukan lagi dipandang sebagai hubungan "atasan dan bawahan" yang saling curiga, melainkan sebagai kemitraan strategis. Manajer tidak memiliki motif untuk mengkhianati pemilik karena mereka merasa bahwa kesuksesan perusahaan adalah kesuksesan mereka juga. Tidak ada konflik kepentingan karena manajer secara sukarela menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi. *Stewardship theory* menekankan kepercayaan karena menganggap manajer memiliki motivasi

internal yang tinggi dan akses informasi yang lebih baik untuk memajukan perusahaan jika diberi keleluasaan. Kepercayaan diberikan agar manajer merasa diberdayakan (*empowered*). Dengan kepercayaan, manajer dapat mengambil keputusan dengan lebih cepat dan efektif tanpa terhambat oleh prosedur pengawasan yang kaku dan mahal.”

Menurut Velte (2010) “karakteristik utama seorang *steward* adalah mereka bukan aktor yang oportunis yang mencari keuntungan pribadi di atas kepentingan orang lain. Sebaliknya, mereka memiliki komitmen alami untuk menjadi pengelola aset perusahaan yang baik dan berusaha mencapai tingkat keuntungan serta pengembalian bagi pemegang saham yang tinggi. Mereka memiliki perilaku "pro-sosial" di mana tujuan kolektif dianggap lebih penting dari pada peningkatan utilitas individu. Selain itu, mereka sangat menjunjung tinggi etika profesi dan memiliki pandangan jangka panjang dalam bertindak. Teori ini menekankan motivasi intrinsik karena terdapat pola perilaku psikologis di mana motivasi finansial akan berkurang kepentingannya seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan seseorang. Fokus utama seorang *steward* bukanlah uang (ekstrinsik), melainkan faktor-faktor seperti tanggung jawab, tantangan dalam bekerja, reputasi perusahaan, dan kepercayaan. Karena *steward* merasa tujuan mereka selaras dengan tujuan pemilik (*goal conformity*), maka sistem insentif finansial yang ketat atau pengawasan yang berlebihan tidak dianggap perlu”

2.1.3 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berakar pada teori institusional yang menekankan bahwa keberlangsungan suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh efisiensi ekonomi atau sumber daya finansial, tetapi juga oleh dukungan dari norma sosial dan budaya masyarakat. Menurut Tang (2017), menjelaskan bahwa “legitimasi organisasi merupakan konsep inti dari teori institusionalisme baru. Teori ini bergeser dari pandangan sistem tertutup yang hanya mementingkan operasi internal, menuju pandangan sistem terbuka di mana batas antara perusahaan dan lingkungan luar menjadi saling terkait.”

Menurut Suchman (1995), teori legitimasi adalah "Persepsi atau asumsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, pantas, atau tepat dalam suatu sistem norma, nilai, keyakinan, dan definisi yang dikonstruksi secara sosial". "Legitimasi organisasi terdiri atas tiga tipe utama yaitu pragmatis, moral, dan kognitif yang secara umum berlandaskan pada persepsi bahwa aktivitas organisasi selaras dengan norma, nilai, dan keyakinan sosial yang berlaku. Namun demikian, ketiga tipe tersebut menunjukkan perbedaan mendasar dalam hal mekanisme pembentukan, respons pemangku kepentingan, serta tingkat fleksibilitas atau manipulasi yang dapat dilakukan oleh organisasi. Berikut tiga tipe utama legitimasi:"(Suchman, 1995).

1. "Legitimasi pragmatis (*pragmatic legitimacy*)"

"Legitimasi pragmatis merupakan bentuk legitimasi yang didasarkan pada kalkulasi kepentingan langsung dari para pemangku kepentingan (audiens) terhadap aktivitas perusahaan. Organisasi dianggap *legitimate* sejauh mampu memberikan manfaat nyata atau memenuhi ekspektasi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti investor, kreditor, pelanggan, maupun masyarakat. Konsep ini menekankan hubungan timbal balik (*exchange relationship*), di mana dukungan terhadap perusahaan diberikan karena adanya nilai atau keuntungan yang dirasakan secara langsung. "

2. Legitimasi moral (*moral legitimacy*)

"Legitimasi moral merujuk pada penilaian normatif mengenai apakah aktivitas perusahaan dipandang sebagai hal yang benar untuk dilakukan. Berdasarkan standar etika, nilai sosial, serta prinsip keberlanjutan yang berlaku di masyarakat. Berbeda dengan legitimasi pragmatis yang berorientasi pada kepentingan langsung, legitimasi moral tidak bergantung pada manfaat pribadi yang diterima oleh pemangku kepentingan, melainkan pada kesesuaian tindakan perusahaan dengan nilai moral kolektif."

3. Legitimasi kognitif (*cognitive legitimacy*)

"Legitimasi kognitif merujuk pada sejauh mana aktivitas perusahaan dapat dipahami, diterima, dan dianggap sebagai sesuatu yang wajar (*taken for granted*) oleh masyarakat. Perusahaan tidak lagi dinilai berdasarkan manfaat

atau benar-salahnya tindakan, melainkan pada tingkat kesesuaian dengan kerangka pemahaman umum yang sudah terbentuk dalam sistem sosial.”

Menurut Deegan (2022), perusahaan beroperasi dalam masyarakat berdasarkan suatu kontrak sosial, baik yang bersifat eksplisit maupun implisit. Apabila terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai perusahaan dengan ekspektasi masyarakat, maka akan timbul *legitimacy gap* (celah legitimasi). Dalam kondisi tersebut, perusahaan cenderung memanfaatkan pengungkapan informasi keberlanjutan sebagai sarana komunikasi strategis untuk memperkecil atau menutup celah tersebut, sekaligus meyakinkan para pemangku kepentingan bahwa aktivitas operasionalnya telah selaras dengan norma sosial yang berlaku serta tidak menimbulkan risiko lingkungan yang tidak dapat diterima.

Menurut Behram (2015), menjelaskan bahwa “pengungkapan sosial merupakan fungsi langsung dari tekanan sosial yang dihadapi oleh organisasi. Industri dengan tingkat dampak lingkungan yang tinggi (*high-impact sectors*), seperti pertambangan, kimia, dan minyak, cenderung menghadapi risiko kritik sosial yang lebih besar dibandingkan dengan industri jasa. Oleh karena itu, perusahaan dalam sektor-sektor yang sensitif terhadap lingkungan tersebut umumnya terdorong untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pengungkapan informasi sebagai bentuk respons terhadap tekanan eksternal. Upaya ini dilakukan guna memperbaiki citra perusahaan serta mempertahankan dukungan masyarakat sebagai entitas yang bertanggung jawab secara sosial.”

2.2. Environmental, Social, Governance (ESG)

Menurut *International Business Machines Corporation* (IBM), “istilah ESG atau lingkungan, sosial dan tata kelola, terkenal di komunitas investor. Hal ini mengacu pada seperangkat metrik yang digunakan untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial organisasi dan telah menjadi semakin penting dalam pengambilan keputusan investasi selama bertahun-tahun. Namun, meskipun istilah *ESG* pertama kali dicetuskan pada tahun 2004 oleh *United Nations Global Compact*, konsep ini sudah ada sejak lama. Pada tahun 1970-an, *Socially Responsible Investment* (SRI) muncul sebagai cara bagi para investor untuk

menyelaraskan portofolio mereka dengan nilai-nilai mereka. Gerakan ini mendapatkan momentum pada tahun 1980-an dengan kampanye divestasi terhadap perusahaan-perusahaan yang berbisnis di Afrika Selatan pada masa *apartheid*. Seiring waktu, SRI terus berevolusi agar terlihat seperti *Corporate Social Responsibility* (CSR) saat ini dan berfokus terutama pada masalah sosial seperti hak asasi manusia dan etika rantai pasokan.”

“Namun, baru pada tahun 1990-an pertimbangan ESG mulai muncul dalam strategi investasi arus utama. Pada tahun 1995, U.S. *Social Investment Forum* (SIF) *Foundation* menginventarisasi semua investasi berkelanjutan di Amerika Utara. Jumlahnya USD639miliar yang memberi gambaran bagaimana para pemegang saham mulai berinvestasi berdasarkan prinsip, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan. Perlahan tapi pasti, investor institusional mulai menyadari bahwa perusahaan berpotensi meningkatkan kinerja keuangan dan manajemen risiko dengan berfokus pada masalah ESG seperti emisi gas rumah kaca. Sebagai tanggapan, manajer aset mulai mengembangkan strategi dan metrik ESG untuk mengukur dampak lingkungan dan sosial dari investasi mereka (IBM.co.id).”

Menurut Matos (2020) “meskipun secara luas diakui bahwa pasar modal telah berkontribusi terhadap alokasi sumber daya yang efisien dan penciptaan kekayaan selama abad terakhir, nilai total yang diberikan perusahaan kepada masyarakat melalui produk dan layanan mereka bergantung pada nilai yang diciptakan bersama oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti pekerja, pemasok, dan komunitas tempat mereka beroperasi. Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran meningkat bahwa paparan perusahaan terhadap faktor-faktor seperti risiko lingkungan, praktik sosial, dan isu tata kelola dapat secara material memengaruhi nilai perusahaan dalam jangka panjang. Contoh kasus besar terkait insiden ESG tersebut meliputi penipuan akuntansi *enron corporation* pada tahun 2001, tumpahan minyak *deepwater horizon* pada tahun 2010, kecurangan uji emisi *volkswagen* pada tahun 2015, serta skandal privasi data *facebook* pada tahun 2018.”

“Terdapat variasi substansial dalam pengungkapan CSR/ESG yang membuat perbandingan objektif menjadi sulit. Matos (2020) mengungkapkan *the regulatory*

environment , yang mana “sebagian besar pelaporan ESG/CSR oleh perusahaan di Amerika Serikat bersifat sukarela, dan isi laporan tersebut diserahkan pada kebijaksanaan masing-masing perusahaan. Christensen, Hail, dan Leuz (2019) menyajikan tinjauan literatur yang komprehensif dalam bidang akuntansi dan keuangan yang menunjukkan bahwa saat ini terdapat variasi yang signifikan dalam pengungkapan CSR, yang mencerminkan heterogenitas aktivitas bisnis perusahaan. Kondisi ini menyebabkan perbandingan objektif atas praktik CSR antar perusahaan menjadi cukup sulit.”

Penerapan ESG atau LST (lingkungan, sosial, dan tata kelola) dalam strategi investasi menurut Kementerian Keuangan (2022) merupakan salah satu pendekatan untuk mengevaluasi sejauh mana investasi berkelanjutan suatu perusahaan memberikan kontribusi kepada para *stakeholder*. Hal ini dilakukan melalui peningkatan keterlibatan *stakeholder*, transparansi informasi, serta perlindungan aspek sosial, sehingga proyek mampu memperoleh dukungan yang lebih luas dan meningkatkan tingkat penerimaan publik. Menurut OJK (2015), “konsep unsur Lingkungan, Sosial Dan Tata Kelola (LST) / environmental, social and governance (ESG) kali pertama diusulkan oleh *United Nation Global Compact (UN Global Compact)* di dalam inisiatif ”*Who Cares Wins*” untuk memfokuskan investor dan analisis keuangan terhadap pentingnya keterpaduan antara ketiga aspek tersebut. Dipahami bahwa perusahaan yang secara proaktif mengelola isu LST / ESG memiliki kinerja yang lebih baik daripada kompetitor sejenis dalam menghasilkan keuntungan kongkrit maupun kasat mata. Integrasi LST relevan untuk memastikan stabilitas keuangan global jangka panjang dan pembangunan ekonomi dengan cara mendorong praktik bisnis berkelanjutan terhadap nasabah sebagai kliennya.”

Inisiatif tersebut diharapkan dapat memastikan agar pencapaian *Sustainable development goals (SDG)* dapat terealisasi. Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau *United Nations (2022)*, SDG (*Sustainable development goals*) adalah “seruan universal untuk bertindak untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet ini, dan meningkatkan kehidupan dan prospek semua orang, di mana saja”. SDG (*Sustainable development goals*) ini terdiri dari 17 goals yang

sudah diadopsi oleh para anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 sebagai salah satu bagian dari agenda *sustainable development* pada tahun 2030. 17 *goals* tersebut menurut *United Nations* (2022) meliputi: “tidak ada kemiskinan, tidak ada rasa lapar sama sekali, kesehatan dan kesejahteraan yang baik, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, energi terjangkau dan bersih, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, mengurangi ketimpangan, kota dan komunitas berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, aksi iklim, kehidupan di bawah air, hidup di darat, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kuat, dan kemitraan untuk tujuan”.

“Sebuah meta analisis terhadap lebih dari 2.200 studi empiris menunjukkan bahwa sekitar 90% penelitian menemukan hubungan non-negatif antara ESG dan kinerja keuangan, dengan mayoritas menunjukkan korelasi positif” (Matos, 2020). Sejalan dengan itu, Dimson et al. (2019) dalam Matos (2020) mengungkapkan “*successful coordinated engagements result in improved financial performance of the target companies, improved shareholder returns, and strengthened relationships between investors and companies.*” Yang artinya keterlibatan (*engagement*) merupakan bentuk interaksi aktif antara investor dan perusahaan dalam memengaruhi kebijakan serta praktik perusahaan, termasuk dalam aspek kinerja keuangan maupun penerapan ESG. Lebih lanjut, Matos (2020) menyatakan bahwa “*successful collaborative engagements are beneficial for shareholders exhibiting positive abnormal stock returns for the three years following engagement*” serta adanya “*lower risk (as measured by lower variability of returns) and increased post-engagement accounting performance*” yang artinya keterlibatan investor, terutama yang berbasis ESG, mampu meningkatkan kinerja perusahaan sekaligus menurunkan risiko, sehingga memberikan manfaat jangka panjang bagi pemegang saham. Namun demikian, Matos (2020) menyoroti adanya tantangan dalam aspek kausalitas, yaitu yaitu hubungan antara penerapan ESG dan kinerja keuangan belum sepenuhnya jelas, di mana peningkatan kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh penerapan ESG, namun di sisi lain perusahaan dengan kinerja

yang sudah baik cenderung memiliki sumber daya lebih untuk mengadopsi praktik ESG.

Penelitian klasik oleh Gompers et al. (2003) dalam Matos (2020) menunjukkan bahwa *“S&P 1500 firms with higher G-index values (poorer governance) realized lower average future returns during the 1990s.”* Selain itu, penelitian tersebut juga menemukan adanya *“positive association between shareholder-friendly governance and firm valuation.”* Temuan ini diperkuat dengan pernyataan bahwa *“the value of corporate governance is not fully priced in by investors.”* Sejalan dengan hal tersebut, kepemilikan oleh investor institusi asing yang membawa standar ESG tinggi turut mendorong peningkatan inovasi dan valuasi perusahaan dalam jangka panjang, di mana valuasi pasar yang lebih tinggi dapat dipandang sebagai bentuk kepercayaan investor terhadap perusahaan dengan risiko masa depan yang lebih rendah.

“Perusahaan dengan permasalahan pada dimensi lingkungan dan sosial cenderung menghadapi biaya pinjaman yang lebih tinggi, seiring meningkatnya perhatian investor terhadap risiko ESG. Hal ini tercermin dari pernyataan Larry Fink dalam suratnya yang menyebutkan bahwa *“climate change is different. Even if only a fraction of the projected impacts is realized, this is a much more structural, long-term crisis. Companies, investors, and governments must prepare for a significant reallocation of capital.”* Sejalan dengan itu, BlackRock juga menegaskan komitmennya untuk mulai mempertimbangkan *“ESG risk with the same rigor that it analyzes traditional measures such as credit and liquidity risk.”* Kondisi tersebut menunjukkan ESG tidak hanya dipandang sebagai aspek keberlanjutan, tetapi juga sebagai alat manajemen risiko yang memengaruhi persepsi investor dan kreditur terhadap profil risiko perusahaan, yang pada akhirnya berdampak pada keputusan struktur modal dan biaya pendanaan perusahaan.

2.3. Sustainability Report

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), (2024) “laporan keberlanjutan berperan sebagai alat komunikasi kunci yang memungkinkan perusahaan untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap praktik berkelanjutan. Ini juga menjadi

sarana bagi perusahaan untuk menjelaskan bagaimana mereka mengatasi tantangan lingkungan dan sosial yang kompleks, serta bagaimana ini mempengaruhi operasi dan strategi bisnis mereka. Laporan keberlanjutan yang efektif dapat membantu membangun kepercayaan dan reputasi perusahaan di mata investor, konsumen, dan pemangku kepentingan lainnya, yang semakin menghargai keberlanjutan sebagai elemen penting dari nilai perusahaan.” Melalui laporan keberlanjutan, perusahaan dapat menunjukkan bagaimana risiko dan peluang keberlanjutan dikelola serta bagaimana pengaruhnya terhadap strategi dan keberlangsungan bisnis perusahaan. Menurut *International Financial Reporting Standards Foundation* (IFRS), “dalam pengambilan keputusan terkait penyediaan sumber daya kepada suatu perusahaan, investor membutuhkan informasi mengenai risiko dan peluang yang berkaitan dengan keberlanjutan perusahaan tersebut. Dalam IFRS S1 dijelaskan bahwa perusahaan perlu menentukan risiko dan peluang keberlanjutan berdasarkan fakta dan kondisi internal perusahaan. Selain itu, perusahaan umumnya telah memiliki proses untuk mengidentifikasi, menilai, dan merespons risiko serta peluang sesuai dengan tujuan bisnis dan tingkat toleransi risiko perusahaan. Namun, pada akhirnya perusahaan tetap menentukan risiko dan peluang mana yang relevan untuk diungkapkan dalam laporan keberlanjutan.”

Setiap perusahaan diwajibkan untuk menerapkan prinsip pelaporan. Menurut *Global Report Initiative*, (2021) “prinsip pelaporan bersifat mendasar untuk mencapai pelaporan keberlanjutan berkualitas tinggi. Ikhtisar prinsip yang harus dilakukan adalah:”

1. “Akurasi
 - “Untuk menerapkan prinsip akurasi, organisasi sebaiknya:”
 - a. “Melaporkan informasi kualitatif yang konsisten dengan bukti yang tersedia dan informasi lain yang dilaporkan;”
 - b. “Menunjukkan data mana yang telah diukur;”
 - c. “Mendeskripsikan pengukuran data secara memadai dan dasar untuk penghitungannya, dan memastikan bahwa replikasi pengukuran dan penghitungan dengan hasil serupa dapat dilakukan;”

- d. “Memastikan bahwa margin kesalahan untuk pengukuran data tidak memengaruhi kesimpulan atau penilaian pengguna informasi;”
 - e. “Menunjukkan data mana yang telah diperkirakan, dan menjelaskan asumsi mendasar dan teknik yang digunakan untuk perkiraan beserta setiap keterbatasan perkiraan tersebut.”
2. “Keseimbangan.”
- “Organisasi harus melaporkan informasi dengan cara netral dan menyediakan gambaran yang seimbang tentang dampak negatif dan positif organisasi. Untuk menerapkan prinsip keseimbangan, organisasi sebaiknya:”
- a. “Menyajikan informasi dengan cara yang memungkinkan pengguna informasi dapat melihat tren negatif dan positif dampak dari tahun ke tahun;”
 - b. “Membedakan dengan jelas antara fakta dan penafsiran fakta oleh organisasi;”
 - c. “Tidak mengabaikan informasi relevan mengenai dampak negatif organisasi;”
 - d. “Tidak menekankan dampak atau berita positif secara berlebihan;”
 - e. “Tidak menyajikan informasi dengan cara yang tidak pantas yang dapat memengaruhi kesimpulan atau penilaian pengguna informasi.”
3. “Kejelasan.”
- “Organisasi harus menyajikan informasi dengan cara yang dapat diakses dan dapat dipahami. Untuk menerapkan prinsip kejelasan, organisasi sebaiknya:”
- a. “Mempertimbangkan kebutuhan aksesibilitas tertentu dari pengguna informasi, yang berkaitan dengan kemampuan, bahasa, dan teknologi;”
 - b. “Menyajikan informasi dengan cara yang membuat pengguna dapat menemukan informasi yang mereka inginkan tanpa upaya yang berlebihan, contohnya, melalui daftar isi, peta, atau tautan;”
 - c. “Menyajikan informasi dengan cara yang dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan memadai tentang organisasi dan kegiatan mereka;”

- d. “Menghindari singkatan, istilah teknis, atau jargon lain yang kemungkinan tidak diketahui oleh pengguna atau, jika hal ini digunakan, menyertakan penjelasan relevan di bagian yang tepat atau pada daftar istilah;”
 - e. “Melaporkan informasi dengan cara yang padat dan mengumpulkan informasi apabila bermanfaat tanpa mengabaikan rincian yang diperlukan;”
 - f. “Menggunakan grafik dan tabel data gabungan untuk membuat informasi dapat diakses dan dapat dipahami.”
4. “Keterbandingan.”
- “Organisasi harus memilih, menyusun, dan melaporkan informasi secara konsisten agar mereka dapat melakukan analisis mengenai perubahan dalam dampak organisasi seiring waktu dan analisis dampak ini yang berkaitan dengan dampak organisasi lain. Untuk menerapkan prinsip keterbandingan, organisasi sebaiknya:”
- a. “Menyajikan informasi untuk periode pelaporan saat ini dan setidaknya dua periode sebelumnya, beserta setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan;”
 - b. “Menggunakan metrik internasional yang diterima (contohnya, kilogram, liter), dan faktor dan protokol konversi standar, apabila berlaku, untuk menyusun dan melaporkan informasi;”
 - c. “Mempertahankan konsistensi dalam metode yang digunakan untuk mengukur dan menghitung data dan dalam menjelaskan metode dan asumsi yang digunakan; mempertahankan konsistensi dalam cara menyajikan informasi;”
 - d. “Melaporkan angka total atau data absolut (contohnya, ekuivalen ton metrik CO₂) beserta rasio atau data yang dinormalkan (contohnya, emisi CO₂ per unit yang dihasilkan) untuk memungkinkan perbandingan, dan menyediakan catatan penjelasan ketika menggunakan rasio;”
 - e. “Menyediakan informasi kontekstual (contohnya, ukuran organisasi, lokasi geografis) untuk membantu pengguna informasi memahami faktor yang berkontribusi pada perbedaan antara dampak organisasi tersebut dan dampak organisasi lain;”

- f. “Menyajikan pengungkapan saat ini di samping penyajian kembali data historis agar dapat dilakukan perbandingan jika telah terjadi perubahan dari informasi yang dilaporkan sebelumnya. Hal ini dapat mencakup perubahan dalam panjang periode pelaporan, dalam metodologi pengukuran, dalam definisi yang digunakan, atau dalam elemen lain dari pelaporan.”
 - g. “Jika penyajian kembali data historis tidak disediakan, jelaskan perubahan yang terjadi untuk menyediakan informasi kontekstual untuk menafsirkan pengungkapan saat ini.”
5. “Kelengkapan.”
- “Organisasi harus menyediakan informasi yang memadai agar penilaian dampak organisasi dapat dilakukan selama periode pelaporan. Untuk menerapkan prinsip Kelengkapan, organisasi sebaiknya:”
- a. “Menyajikan kegiatan, peristiwa, dan dampak untuk periode pelaporan di mana ketiga hal tersebut terjadi. Hal ini termasuk melaporkan informasi tentang kegiatan yang memiliki dampak minimal dalam jangka pendek, tetapi dampak kumulatif yang cukup dapat diperkirakan menjadi tak terhindarkan atau tidak dapat dipulihkan dalam jangka panjang (contohnya, kegiatan yang menghasilkan polutan bioakumulatif atau persisten);”
 - b. “Tidak mengabaikan informasi yang diperlukan untuk memahami dampak organisasi.”
6. “Konteks keberlanjutan.”
- “Organisasi harus melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan telah didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengganggu kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Tujuan pelaporan keberlanjutan menggunakan standar GRI adalah untuk menyediakan transparansi tentang cara organisasi berkontribusi atau bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Untuk tujuan ini, organisasi perlu menilai dan melaporkan informasi tentang dampak mereka dalam konteks yang lebih luas dari pembangunan berkelanjutan. Untuk menerapkan prinsip keberlanjutan, organisasi sebaiknya:”

- a. “Memanfaatkan informasi objektif dan tindakan otoritatif mengenai pembangunan berkelanjutan untuk melaporkan informasi tentang dampak-dampak organisasi (contohnya, penelitian ilmiah atau konsensus tentang batasan dan kebutuhan yang ada pada sumber daya lingkungan);”
 - b. “Melaporkan informasi tentang dampak organisasi yang terkait dengan tujuan dan kondisi Pembangunan berkelanjutan (contohnya, melaporkan emisi gas rumah kaca (GHG) total beserta penurunan emisi gas rumah kaca yang terkait dengan tujuan yang ditetapkan dalam konvensi kerangka kerja perserikatan bangsa-bangsa (PBB) tentang perubahan iklim perjanjian paris);”
 - c. “Melaporkan informasi tentang dampak-dampak mereka terkait dengan ekspektasi masyarakat dan ekspektasi tata cara bisnis yang bertanggung jawab yang ditetapkan dalam instrumen resmi antarpemerintah yang diharapkan dipatuhi oleh organisasi (contohnya, Panduan Organisasi untuk kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) untuk perusahaan multinasional , prinsip-prinsip penuntun tentang bisnis dan hak asasi manusia PBB) dan dalam instrumen spesifik sektor, lokal, regional, atau global lainnya yang diakui;”
 - d. “Jika beroperasi di berbagai lokasi, melaporkan informasi tentang dampak organisasi terkait dengan konteks local yang sesuai (contohnya, melaporkan penggunaan total air, beserta penggunaan air terkait dengan ambang batas berkelanjutan dan konteks sosial daerah tangkapan air tertentu).”
7. “Ketepatan Waktu.”
- “Organisasi harus melaporkan informasi secara rutin dan menyediakan informasi tersebut secara tepat waktu bagi pengguna informasi untuk mengambil keputusan. Untuk menerapkan prinsip ketepatan waktu, organisasi sebaiknya:”
- a. “Menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk menyediakan informasi dengan tepat waktu dan memastikan bahwa informasi tersebut berkualitas tinggi dan memenuhi persyaratan berdasarkan prinsip pelaporan lainnya;”

- b. “Memastikan konsistensi dalam panjang periode pelaporan;”
 - c. “Menunjukkan periode waktu yang dicakup oleh informasi yang dilaporkan.”
8. “Keterverifikasian.”
- “Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, dan menganalisis informasi dengan cara sedemikian rupa sehingga informasi tersebut dapat diteliti untuk menentukan kualitasnya. Untuk menerapkan prinsip keterverifikasian, organisasi sebaiknya:”
- a. “Mendirikan kendali *internal* dan mengelola dokumentasi dengan cara sedemikian rupa sehingga individu selain mereka yang mempersiapkan informasi yang dilaporkan (contohnya, auditor *internal*, penyedia penjaminan eksternal) dapat meninjaunya;”
 - b. “Mendokumentasikan proses pengambilan keputusan yang mendasari pelaporan keberlanjutan organisasi dengan cara yang memungkinkan dapat dilakukannya pemeriksaan keputusan dan proses utama, seperti proses dalam menentukan topik material;”
 - c. “Jika organisasi merancang sistem informasi untuk pelaporan keberlanjutan, rancanglah sistem ini dengan cara sedemikian rupa sehingga dapat diteliti sebagai bagian dari proses penjaminan eksternal;”
 - d. “Dapat mengidentifikasi sumber asli dari informasi yang dilaporkan dan menyediakan bukti yang terpercaya untuk mendukung asumsi atau perhitungan;”
 - e. “Dapat menyediakan gambaran dari sumber asli dari informasi yang dilaporkan yang menegaskan akurasi informasi dalam margin kesalahan yang dapat diterima;”
 - f. “Menghindari mencantumkan informasi yang tidak didukung oleh bukti kecuali informasi tersebut relevan untuk memahami dampak organisasi;”
 - g. “Menyediakan penjelasan yang jelas tentang setiap ketidakpastian yang berkaitan dengan informasi yang dilaporkan.”

Manfaat *sustainability report* menurut (*World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 2019*), “laporan keberlanjutan menjadi media penting bagi

perusahaan untuk menggambarkan proses penciptaan nilai serta mengungkap risiko dan peluang yang dihadapi. Berikut adalah manfaat utama dari laporan keberlanjutan:”

1. “Meningkatkan pemahaman dan komunikasi *internal & eksternal*.”
 - a. “Membantu perusahaan untuk memahami menciptakan nilai perusahaan.”
 - b. “Mengkomunikasikan strategi dan kinerja perusahaan.”
 - c. “Menyoroti risiko dan peluang bagi perusahaan.”
 - d. “Mendemonstrasikan bahwa perusahaan telah mempertimbangkan eksternalitas (peluang dan risiko) dalam kebijakan dan strategi mereka.”
 - e. “Meningkatkan transparansi dengan melakukan pengukuran, perbandingan, dan peningkatan kinerja, yang menguntungkan secara *internal dan eksternal*.”
2. “Pengambilan keputusan strategis dan manajemen risiko.”
 - a. “Memberikan dasar yang kuat untuk diskusi dan eksplorasi potensi penyelarasan dan rasionalisasi yang lebih besar dalam pelaporan.”
 - b. “Memprioritas isu material dengan membantu memprioritaskan isu-isu ESG yang paling relevan dan penting.”
 - c. “Penting untuk manajemen risiko, penetapan target strategis, dan pengambilan keputusan, melampaui optimasi finansial semata.”
3. “Memenuhi Harapan Pemangku Kepentingan dan Investor.”
 - a. “Memberikan informasi yang lebih dapat dibandingkan dan berguna bagi pemangku kepentingan.”
 - b. “Memenuhi permintaan yang berkembang dari komunitas investor dan regulator untuk pengungkapan keuangan yang lebih baik terkait risiko dan peluang terkait iklim dan lingkungan.”
 - c. “Meningkatkan kepercayaan investor dengan data yang material dan penting serta memiliki kualitas yang setara dengan data keuangan, yaitu dijamin secara wajar.”

4. “Meningkatkan kredibilitas dan keandalan”
 - a. “Penjaminan eksternal atas informasi keberlanjutan, meningkatkan kredibilitas dan keandalan laporan bagi pengguna.”
 - b. “Menyediakan informasi ESG berbasis materialitas, berkualitas tinggi, dan dapat dibandingkan.”

5. “Kontribusi terhadap keberlanjutan yang lebih luas”
 - a. “Transformasi sistem keuangan dengan menjadi landasan untuk mengubah sistem keuangan agar lebih menghargai perusahaan yang paling berkelanjutan.”
 - b. “Mendorong pertumbuhan yang meningkatkan nilai secara berkelanjutan adalah inti dari strategi perusahaan dan memengaruhi cara mereka berbisnis setiap hari dengan nilai keberlanjutan.”
 - c. “Tata kelola yang baik atas isu-isu pembangunan berkelanjutan bermanfaat bagi masyarakat, pemangku kepentingan, dan perusahaan.”

Namun, di balik prinsip pelaporan dan manfaat *sustainability report*. Pelaporan keberlanjutan membutuhkan suatu kebijakan dari pemerintah untuk mewajibkan seluruh perusahaan di Indonesia mengungkapkan semua informasi keberlanjutannya (Doloksaribu & Firmansyah, 2024). Pemerintah Indonesia dalam pelaksanaannya terkait *sustainability report* didukung oleh sejumlah peraturan pemerintah, diantaranya :

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasal 68 tentang kewajiban pelaku usaha dan/atau kegiatan, berbunyi:
“Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban:”
 - a. “Memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;”
 - b. “Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup;”

- c. “Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.”
- 2) POJK No.51/POJK.03/2017 yang mengatur mengenai penerapan keuangan berkelanjutan bagi lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik. Pasal 10 tentang kewajiban penyusunan laporan keberlanjutan, berbunyi:
- a) “Ayat 1”
“LJK, emiten, dan perusahaan publik wajib menyusun laporan keberlanjutan.”
 - b) “Ayat 2”
“Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 disusun secara terpisah dari laporan tahunan atau sebagai bagian yang tidak terpisah dari laporan tahunan.”
 - c) “Ayat 3”
“Laporan keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib disampaikan kepada otoritas jasa keuangan setiap tahun paling lambat sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan tahunan yang berlaku untuk masing-masing LJK, emiten, dan perusahaan publik.”

Lampiran II POJK 51/POJK.03/2017 memuat komponen-komponen yang harus diungkapkan dalam *sustainability report* yaitu:

- a. Penjelasan strategi keberlanjutan.
- b. Ikhtisar kinerja (aspek ekonomi, sosial, lingkungan).
- c. Profil singkat entitas.
- d. Penjelasan direksi.
- e. Tata kelola keberlanjutan.
- f. Kinerja keberlanjutan.
- g. Verifikasi tertulis independen (jika ada).
- h. *Feedback* untuk pembaca (jika ada).
- i. Tanggapan atas *feedback* tahun sebelumnya.

Terakhir, Pasal 13 tentang sanksi atas pelanggaran ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa entitas (LJK atau emiten/perusahaan publik bukan LJK) yang

melanggar kewajiban penyusunan atau publikasi *sustainability report* dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran/peringatan tertulis.

- 3) Peraturan Menteri BUMN PER-05/MBU/04/2021 yang berisi perusahaan milik negara/daerah juga dituntut untuk melaksanakan dan melaporkan aktivitas sosial yang dilakukannya.

Menurut pedoman *global reporting initiative standard* (2016) pengungkapan dalam GRI memiliki 2 jenis pengungkapan standar yaitu standar umum dan khusus. Pengungkapan standar umum memiliki 6 kategori dan standar khusus memiliki 3 kategori. Menurut GRI 102 (2016) standar pengungkapan umum sebagai berikut :

- 1) “Profil organisasi”
“memberikan gambaran tentang ukuran, lokasi geografis, dan kegiatan perusahaan.”
- 2) “Strategi”
“Memberikan gambaran tentang strategi perusahaan perihal keberlanjutan.”
- 3) “Etika dan integritas”
“Memberikan gambaran tentang nilai, prinsip, standar dan norma organisasi.”
- 4) “Tata kelola”
“Memberikan gambaran tentang struktur kelola, komposisi, peran badan tata kelola dalam mengevaluasi kinerja organisasi.”
- 5) “Keterlibatan pemangku kepentingan”
“Memberikan gambaran tentang pendekatan organisasi terhadap keterlibatan pemangku kepentingan.”
- 6) “Praktik pelaporan”
“Memberikan gambaran tentang proses yang telah diikuti organisasi untuk menentukan isi laporan keberlanjutan.”

Sedangkan, menurut *global reporting initiative* (2016) standar pengungkapan khusus sebagai berikut :

1) “Ekonomi”

“Semua dampak atas aktivitas perusahaan terhadap kondisi ekonomi dari pemangku kepentingan dan sistem ekonomi di tingkat local, nasional, maupun global.”

2) “Lingkungan”

“Semua dampak atas aktivitas perusahaan terhadap alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, air, udara, ekosistem, keanekaragaman hayati, dan dampak terkait produk dan jasa serta kepatuhan dan biaya lingkungan.”

3) “Sosial”

“Semua dampak atas aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan kerja, masyarakat, hak asasi manusia, dan tanggung jawab atas produk”

2.4. Pengungkapan Item GRI Standards di dalam *Sustainability Report*

Menurut Wagenhofer (2024), “Pengungkapan *sustainability report* memberikan informasi tentang dampak dari topik lingkungan, sosial, dan tata kelola dan dengan demikian tentang risiko dan peluang keuangan, yang seringkali bersifat jangka panjang. Dampak-dampak ini perlu dipertimbangkan dalam akuntansi dan pengungkapan keuangan. Secara khusus, akuntansi keuangan menggabungkan banyak asumsi yang dibuat tentang masa depan, yang dikumpulkan ke dalam pengukuran. Asumsinya harus konsisten di seluruh laporan keberlanjutan dan keuangan.” Menurut Dewi et al (2025), “Praktik bisnis berkelanjutan melalui *sustainability report* akan meningkatkan relevansi informasi terkait terhadap kinerja keuangan. Indikator keberhasilan suatu bisnis yang paling dapat diandalkan adalah kesehatan finansialnya. Keberhasilan finansial perusahaan sangat bergantung pada kemampuannya dalam merencanakan dan melaksanakan strategi bisnis yang menghasilkan keputusan investasi yang menguntungkan.”

Secara umum, regulasi terkait pengungkapan ESG di berbagai negara masih berada pada tahap perkembangan, di mana sebagian telah bersifat wajib, sementara

lainnya masih dalam proses penerapan atau bersifat sukarela. Menurut *International Business Machines Corporation (IBM)*, “seperti *Corporate Sustainability Reporting Directive (CSR)* Uni Eropa yang mengharuskan bisnis untuk melaporkan dampak lingkungan dan sosial dari kegiatan bisnis mereka, dan dampak bisnis dari upaya ESG mereka. Di Amerika Utara, *Securities and Exchange Commission (SEC)* sedang mempertimbangkan pelaporan ESG wajib untuk perusahaan publik, seperti halnya di Kanada, Brasil, India, Australia, dan Jepang. Peringkat dan indeks ESG juga menjadi lebih umum dalam beberapa tahun terakhir. *Morgan Stanley Capital International (MSCI)*, misalnya, menawarkan berbagai indeks ESG yang memungkinkan investor untuk melacak perusahaan berdasarkan kinerja ESG mereka.”

Penelitian ini menggunakan standar yang dikeluarkan oleh GRI (*Global Reporting Initiative*). “Pada tahun 1997, *Global Reporting Initiative (GRI)* didirikan dengan tujuan untuk mengatasi masalah lingkungan, meskipun segera memperluas cakupannya untuk juga fokus pada masalah sosial dan tata kelola (IBM.co.id).” Menurut *Global Reporting Initiative (2021)*, “Standar GRI merupakan sebuah praktik terbaik global untuk melaporkan berbagai dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial secara publik. Pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan berdasarkan standar GRI memberikan informasi tentang kontribusi positif atau negatif organisasi terhadap pembangunan berkelanjutan. Standar GRI adalah sebuah standar dengan sistem modular yang saling terkait. Tiga rangkaian standar mendukung proses pelaporan yaitu standar universal GRI, yang berlaku untuk semua organisasi, standar sektor GRI, berlaku untuk sektor tertentu, dan standar topik GRI, masing-masing memberikan pengungkapan yang relevan terkait dengan topik tertentu. Menggunakan Standar ini dalam menentukan topik material (relevan) membantu organisasi dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan.”

sustainability report berpedoman pada standar GRI (*Global Reporting Initiative*). Pengakuan terhadap standar *Global Reporting Initiative (GRI)* sebagai standar internasional semakin diperkuat sejak tahun 2015, *National Center For Sustainability reporting (NCSR)* menggelar *Sustainability reporting Awards (SRA)*

secara berkala (setiap tahun), namun sejak tahun 2018, ajang tersebut kini diberi nama *Asia Sustainability reporting Rating* (Asia SR Rating), Karena pesertanya tidak hanya dari Indonesia tetapi juga dari negara asing, selain itu terdapat pula perubahan dari sistem *award winner* menjadi sistem rating, serta pemberian penghargaan yang tidak lagi berdasarkan urutan peringkat, melainkan berdasarkan pengelompokan *platinum, gold, silver, dan bronze*.

Menurut *Global Reporting Initiative* (2021), “standar pelaporan keberlanjutan yang dikembangkan oleh GRI mengalami perkembangan bertahap dari waktu ke waktu. Pedoman awal yang diperkenalkan adalah G1 pada tahun 2000, yang menjadi kerangka global pertama untuk penyusunan sustainability report. Selanjutnya, pedoman tersebut diperbarui menjadi G2 pada tahun 2002. Seiring meningkatnya kebutuhan dan permintaan terhadap pelaporan berbasis standar GRI, pedoman ini kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi G3 pada tahun 2006 dan G4 pada tahun 2013. Pada tahun 2015, GRI mulai mengintegrasikan kerangka kerja *Sustainable Development Goals* ke dalam pendekatannya. Perkembangan tersebut berlanjut dengan diterbitkannya *GRI Standards* 2016 sebagai bentuk penyempurnaan dari pedoman sebelumnya.”

“Hingga saat ini, versi terbaru yang berlaku adalah *GRI standards* 2021, yang merupakan hasil pengembangan lebih lanjut dari *GRI standards* 2016. *GRI standards* 2021 memiliki tanggal berlaku 1 Januari 2023. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan harus menggunakan *GRI standards* 2021 untuk informasi yang dipublikasikan pada atau setelah 1 Januari 2023. Pada penelitian ini menggunakan *GRI Standards* 2021 yang terdiri dari 117 item (GRI,2021).

Tabel 2.1 Standar GRI 2021

Standar Universal	
GRI 1: Landasan 2021	Memperkenalkan tujuan dan sistem standar GRI dan menjelaskan konsep dasar untuk pelaporan keberlanjutan. GRI 1 juga menguraikan berbagai persyaratan dan prinsip pelaporan yang harus dipatuhi oleh organisasi untuk menyusun laporan sesuai dengan Standar GRI.

<p>GRI 2: Pengungkapan Umum 2021</p>	<p>Berisi pengungkapan yang digunakan oleh organisasi untuk menyediakan informasi tentang praktik pelaporan mereka dan berbagai detail organisasi lainnya, seperti kegiatan, tata kelola, dan kebijakan. Informasi ini memberikan wawasan mengenai profil dan skala organisasi serta memberikan konteks untuk memahami dampak organisasi.</p>
<p>GRI 3: Topik Material 2021</p>	<p>Menyediakan panduan secara bertahap tentang cara menentukan topik material. GRI 3 juga berisi pengungkapan yang digunakan organisasi untuk melaporkan informasi tentang proses penentuan topik material, daftar topik material, dan cara mengelola setiap topik.</p>
<p>GRI 200 : Ekonomi</p>	
<p>GRI 201: <i>Economic performance</i> 2016. GRI 202: <i>Market presence</i> 2016. GRI 203: <i>Indirect economic impacts</i> 2016. GRI 204: <i>Procurement practices</i> 2016. GRI 205: <i>Anti corruption</i> 2016. GRI 206: <i>Anti competitive behavior</i> 2016. GRI 207: <i>Tax</i> 2019</p>	<p>Berkaitan dengan kinerja ekonomi, kehadiran pasar, dampak ekonomi secara tidak langsung, praktek perolehan atau pembelian, anti korupsi serta perilaku anti persaingan.</p>
<p>GRI 300: Lingkungan</p>	
<p>GRI 301: <i>Materials</i> 2016 GRI 302: <i>Energy</i> 2016 GRI 303: <i>Water and effluents</i> 2018 GRI 304: <i>Biodiversity</i> GRI 305: <i>Emissions</i> 2016 GRI 306: <i>Waste</i> 2020 GRI 308: <i>Supplier environmental assessment</i> 2016</p>	<p>Berkaitan dengan material, energi, air dan limbah cair, keanekaragaman hayati, emisi, limbah dan sampah, kepatuhan lingkungan, serta penilaian kinerja pemasok untuk aspek lingkungan.</p>

GRI 400: Sosial	
GRI 401: <i>Employment</i> 2016	Berkaitan dengan pekerjaan, hubungan buruh/manajemen, keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan dan pendidikan, keanekaragaman dan persamaan kesempatan, non-diskriminasi, kebebasan berserikat dan berunding bersama, pekerja anak, kerja paksa, praktek keamanan, hak masyarakat adat, penilaian HAM, komunitas lokal, penilaian kinerja pemasok dari aspek sosial, kebijakan publik, keamanan dan kesehatan pelanggan, pemasaran dan pelabelan, privasi pelanggan serta kepatuhan terhadap regulasi terkait aspek sosial.
GRI 402: <i>Labor/management relations</i> 2016	
GRI 403: <i>Occupational health and safety</i> 2018	
GRI 404: <i>Training and education</i> 2016	
GRI 405: <i>Diversity and equal opportunity</i> 2016	
GRI 406: <i>Non discrimination</i> 2016	
GRI 407: <i>Freedom of association and collective bargaining</i> 2016	
GRI 408: <i>Child labor</i> 2016	
GRI 409: <i>Forced or compulsory labor</i> 2016	
GRI 410: <i>Security practices</i> 2016	
GRI 411: <i>Rights of indigenous peoples</i> 2016	
GRI 413: <i>Local communities</i> 2016	
GRI 414: <i>Supplier social assessment</i> 2016	
GRI 415: <i>Public policy</i> 2016	
GRI 417: <i>Marketing and labeling</i> 2016	
GRI 418: <i>Customer privacy</i> 2016	

Sumber Data: *Global Reporting Initiative* (2021)

“Standar GRI 2016 yang akan segera diketahui sebagai versi lama atau sebelumnya dari metode pelaporan, akan pensiun pada Desember 2022 ini, itu akan dihentikan dan metode pelaporan versi 2021 yang diperbarui baru akan berlaku mulai 1 Januari 2023” (Ramamurty, 2023). “berikut beberapa perubahan dari GRI standards 2016 menjadi GRI Standards 2021:”

1. “Aspek pemberlakuan standar.”
 - a. “GRI *Standards* 2016 berlaku hingga 31 Desember 2022 dan kemudian dihentikan penggunaannya.”
 - b. “GRI *Standards* 2021 mulai berlaku efektif pada 1 Januari 2023 sebagai standar terbaru dalam pelaporan keberlanjutan.”
2. “Struktur kategori standar.”
 - a. “GRI 2016 terdiri atas dua kategori utama, yaitu Standar Universal (seri 100) dan Standar Topik yang meliputi aspek ekonomi (seri 200), lingkungan (seri 300), dan sosial (seri 400).”
 - b. “GRI 2021 mengalami pengembangan menjadi tiga kategori, yaitu Standar Universal, Standar Sektor, dan Standar Topik.”

3. “Penambahan standar sektor.”
 - a. “Pada GRI 2016 belum terdapat standar sektor.”
 - b. “GRI 2021 memperkenalkan standar sektor sebagai komponen baru yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing industri.”
4. “Pembaruan standar universal.”
 - a. “GRI 2016 menggunakan seri 100 sebagai standar universal.”
 - b. “GRI 2021 memperbarui standar universal menjadi tiga bagian utama, yaitu GRI 1 (*foundation*), GRI 2 (*general disclosures*), dan GRI 3 (*material topics*), yang mengalami revisi signifikan.”
5. “Perubahan pada standar topik.”
 - a. “Pada GRI 2016 seluruh standar topik masih digunakan secara lengkap.”
 - b. “Pada GRI 2021 beberapa standar ditarik atau digabungkan, sehingga jumlah standar menjadi lebih ringkas tanpa mengubah substansi utama, serta tetap menggunakan kode dan tahun publikasi sebelumnya.”
6. “Pendekatan sistem pelaporan.”
 - a. “GRI 2016 telah menggunakan sistem modular, namun masih bersifat umum.”
 - b. “GRI 2021 mengembangkan sistem modular yang lebih terintegrasi antara standar universal, sektor, dan topik.”
7. “Pendekatan dalam penentuan topik material.”
 - a. “Pada GRI 2016, penentuan topik material lebih bergantung pada analisis internal perusahaan.”
 - b. “Pada GRI 2021, penentuan topik material dilakukan dengan mengacu pada GRI 3 serta mempertimbangkan standar sektor, sehingga lebih relevan dengan dampak industri.”
8. “Tujuan dan kualitas pelaporan.”
 - a. “GRI 2016 berfungsi sebagai standar global awal dalam pelaporan keberlanjutan.”
 - b. “GRI 2021 bertujuan meningkatkan kualitas, kelengkapan, dan konsistensi pelaporan, khususnya dalam mengungkapkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial.”

Menurut *ESG Intelligence*, "pentingnya *disclosure* dalam GRI Standard tidak hanya menilai kuantitas indikator yang dilaporkan. GRI juga menilai relevansi dan kualitas informasi yang disampaikan. Perusahaan harus melaporkan isu-isu material yang penting bagi pemangku kepentingan. Selain itu, mereka harus mematuhi prinsip-prinsip pelaporan seperti keakuratan, kejelasan, dan keseimbangan. Perkembangan GRI dari G3 ke G4, lalu ke GRI Standard 2016, dan GRI Standard 2021 mencerminkan upaya peningkatan fleksibilitas. GRI terus berusaha membuat pelaporan lebih relevan dengan kebutuhan sektor. Organisasi kini dapat menyesuaikan laporan mereka dengan konteks masing-masing. Namun, transparansi dan akuntabilitas tetap menjadi prioritas utama."

"Penggunaan *GRI scoring* sebagai metode penilaian juga memberikan tambahan nilai bagi organisasi dalam mengukur kualitas laporan mereka, sehingga dapat memastikan bahwa pelaporan keberlanjutan yang disusun benar-benar mencerminkan komitmen terhadap keberlanjutan dan dampak positif yang dihasilkan. Hasil dari perhitungan ini biasanya dikategorikan dalam beberapa tingkatan untuk memberikan gambaran umum tentang kualitas laporan. Tingkat pengungkapan yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki transparansi yang baik dan berkomitmen terhadap praktik keberlanjutan yang mendalam.

Tabel 2.2 Klasifikasi Tingkat Pengungkapan

Score	Klasifikasi
70% - 100%	Tinggi
50% - 69%	Sedang
<50%	Rendah

Sumber Data : *ESG Intelligence*

"Untuk mendapatkan *GRI scoring*, penting untuk memahami bagaimana *disclosure* atau pengungkapan informasi dalam laporan perusahaan dinilai berdasarkan standar GRI. *Disclosure* adalah elemen kunci dalam pelaporan keberlanjutan, yang mengukur sejauh mana suatu perusahaan memenuhi kewajiban untuk melaporkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial mereka sesuai standar GRI (*ESG Intelligence*).” Penelitian ini menghitung pengungkapan item GRI

standards di dalam *sustainability report* menggunakan variabel *dummy approach*, yaitu setiap item *sustainability report* yang diungkapkan akan diberi nilai 1 (satu), dan 0 (nol) apabila tidak diungkapkan. Jumlah pengungkapan item (skor) akan dijumlahkan untuk memperoleh total skor bagi setiap perusahaan. Setelah itu, pengungkapan item GRI *standards* di dalam *sustainability report* akan diperoleh dengan membagi total skor pengungkapan item dengan jumlah skor atau pengungkapan item maksimal yang harus diungkapkan. Pengungkapan item GRI *Standards* di dalam *sustainability report* dalam penelitian ini diprosikan dengan SRDI (*Sustainability report Disclosure Index*) seperti yang dinyatakan oleh (Adelita et al, 2024) sebagai berikut:

$$SRi = \frac{\sum Xi}{Ni} \quad (2.1)$$

Keterangan:

SRi : Indeks pengungkapan *sustainability report*.

$\sum Xi$: Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan.

Ni : Jumlah seluruh item pengungkapan pada pedoman GRI standards

2.5. Profitabilitas

Menurut Weygandt et al (2022) “profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan atau operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.” “Perusahaan memerlukan keuangan yang bagus agar dapat memenuhi tanggung jawabnya dalam meningkatkan keberlanjutan perusahaan dan sosial. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi menandakan perusahaan memiliki keuangan yang bagus sehingga pengungkapan *sustainability report* akan semakin luas karena ini merupakan bentuk tanggung jawab perusahaan agar mendapatkan kepercayaan dari *stakeholder* atas kemampuan perusahaan dalam memenuhi harapan *stakeholder*” Gunawan & Sjarief (2022). Menurut Weygandt (2022) terdapat beberapa “rasio profitabilitas yang terdiri dari:”

1. *“Profit Margin (PM)”*
“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan bersih setelah dipotong pajak. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih.”
2. *“Asset Turnover”*
“Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan penjualan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi penjualan bersih dengan rata-rata aset.”
3. *“Return on Assets (ROA)”*
“Rasio yang mengukur laba perusahaan atau entitas yang diperoleh dari penggunaan aset perusahaan. rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata total aset.”
4. *“Return on Shareholder’s Equity”*
“Rasio yang mengukur profitabilitas perusahaan melalui sudut pandang pemegang saham biasa. Rasio ini menunjukkan seberapa banyak laba bersih yang dapat perusahaan peroleh untuk setiap uang yang diinvestasikan oleh pemilik saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata modal pemegang saham biasa.”
5. *“Earning Per Share (EPS)”*
“Rasio yang mengukur laba bersih yang diperoleh dari setiap saham biasa perusahaan. Rasio ini dihitung dengan cara membagi laba bersih dengan rata-rata tertimbang jumlah lembar saham biasa yang beredar.”
6. *“Price Earning Ratio”*
“Rasio yang menghitung kemampuan saham dalam menghasilkan laba atau mengukur tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan pada suatu saham. Rasio ini dihitung dengan cara membagi harga pasar per lembar saham dengan laba per saham.”
7. *“Payout Ratio”*
“Rasio yang mengukur persentase dari laba yang didistribusikan dalam bentuk dividen kas. Rasio ini dihitung dengan cara membagi dividen tunai dengan laba bersih.”

“Variabel profitabilitas dalam penilitan ini menggunakan pengukuran *Return On Asset* (ROA) dipilihnya pengukuran ini, karena ROA menghitung laba menggunakan akun *Earning After Interest and Tax* (EAIT). Teori *stakeholders* menghubungkan profitabilitas dengan *sustainability report* yaitu profitabilitas tinggi dapat menunjukkan adanya laba yang tinggi, sehingga kinerja keuangan menjadi tinggi, maka tingkat kepercayaan perusahaan tinggi. Tingkat kepercayaan yang tinggi membuat perusahaan dapat memberitakan kinerja perusahaan pada *sustainability report*”(Yunan et al., 2021).

Menurut Weygandt, et al. (2022), “*Return on Assets* (ROA) merupakan rasio untuk mengukur profitabilitas yang dihasilkan oleh perusahaan dengan menggunakan aset perusahaan. Semakin tinggi ROA maka semakin efisien suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari aset yang dimilikinya. ROA yang makin rendah memperlihatkan bahwa perusahaan masih mempunyai ruang untuk menggunakan asetnya secara lebih efektif” (Astuti & Lestari, 2024). ROA dapat dirumuskan sebagai berikut Weygandt et al (2022):

$$ROA = \frac{Net\ Income}{Average\ Total\ Asset} \quad (2.2)$$

Keterangan:

ROA : *Return on Assets*

Net Income : Laba Bersih

Total Assets : Total Aset

Menurut Weygandt et al (2022) rata-rata total aset dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Average\ Total\ Asset = \frac{Assets\ \tau + Assets\ \tau - 1}{2} \quad (2.3)$$

Keterangan:

Average Total Assets : Rata-rata total aset

Asset_t : Total aset perusahaan pada periode berjalan

Asset_{t-1} : Total aset perusahaan pada periode sebelumnya

Menurut Kieso *et al* (2024), “*net income* adalah penghasilan setelah semua pendapatan dan biaya untuk periode tersebut diperhitungkan”. “Laporan laba rugi mencantumkan pendapatan dahulu, diikuti oleh biaya. *Net income* merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama satu periode waktu. Saat pendapatan lebih tinggi daripada biaya maka timbul laba bersih (*net income*). Ketika beban melebihi pendapatan maka akan menimbulkan *net loss*” (Weygandt *et al*, 2022).

“Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang mengukur keberhasilan operasional suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Laporan laba rugi memiliki komponen-komponen sebagai berikut” (Kieso *et al.*, 2024):

1. “*Sales*”
“Perhitungan pendapatan bersih atas penjualan yang terdiri dari penjualan, diskon atas penjualan, retur penjualan”
2. “*Cost of goods sold*”
“Harga pokok penjualan merupakan harga pokok barang jadi dalam persediaan yang dijual kepada pelanggan selama periode akuntansi berjalan”
3. “*Gross profit*”
“Hasil dari pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan”
4. “*Selling expenses*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan penjualan”
5. “*Administrative or general expenses*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan administrasi perusahaan”
6. “*Other income and expense*”
“Mencakup sebagian besar transaksi lain yang tidak sesuai dengan kategori pendapatan dan beban yang telah disebutkan sebelumnya. Item tersebut dapat berupa keuntungan dan kerugian dari penjualan aset jangka panjang dan penurunan nilai aset. Pendapatan seperti pendapatan sewa, pendapatan dividen dan pendapatan bunga juga dilaporkan dalam bagian *other income and expense*”

7. “*Income from operations*”
“Hasil dari pengurangan antara *gross profit* dengan *selling expense* dan *administrative* atau *general expense* serta ditambah atau dikurangi dengan *other income and expense* maka menjadi *income from operations*. *Income from operations* merupakan penghasilan perusahaan yang didapatkan dari operasi normal”
8. “*Financing costs*”
“Informasi mengenai pengeluaran perusahaan dalam kegiatan pembiayaan seperti beban bunga”
9. “*Income before income tax*”
“Merupakan total pendapatan sebelum pajak atau hasil dari pengurangan *income from operations* dengan *financing cost*”
10. “*Income tax*”
“Pajak yang dipungut atas penghasilan sebelum pajak penghasilan”
11. “*Income from continuing operations*”
“Merupakan hasil perusahaan sebelum keuntungan atau kerugian dari operasi yang dihentikan, jika tidak memilikinya maka bagian ini tidak dilaporkan dan jumlahnya akan dilaporkan sebagai laba bersih.”
12. “*Discontinued operations*”
“Merupakan keuntungan atau kerugian dari operasional perusahaan yang dihentikan.”
13. “*Net income*”
“Merupakan hasil bersih dari kinerja perusahaan selama periode tertentu.”
14. “*Non-controlling interest*”
“Menampilkan alokasi dari laba bersih perusahaan untuk pemegang saham pengendali serta untuk kepentingan non pengendali yang muncul jika terdapat konsolidasi perusahaan”
15. “*Earning per share*”
“Merupakan laba per lembar saham yang dilaporkan”

Menurut Kieso, et al. (2024), “aset diklasifikasikan menjadi 2 yaitu *current asset* dan *non-current asset*”

1. “*Current asset* (aset lancar)”

“Aset lancar merupakan kas dan aset lain perusahaan yang diharapkan dapat terkonversi ke dalam kas, dijual, atau digunakan selama satu tahun atau dalam siklus operasi, yang mana lebih lama”

a. “*Receivables*”

“Perusahaan harus secara jelas mengidentifikasi kerugian yang terjadi dalam waktu satu tahun”.

b. “*Inventories*”

“Untuk diantisipasi karena piutang tak tertagih, jumlah dan sifat dari setiap piutang non-usaha, dan setiap piutang yang digunakan sebagai jaminan. Untuk piutang yang timbul dari transaksi yang tidak biasa (seperti penjualan properti, atau pinjaman kepada rekanan atau karyawan), perusahaan harus mengklasifikasikannya secara terpisah sebagai piutang jangka panjang, kecuali jika penagihannya diperkirakan akan menyajikan persediaan secara tepat, perusahaan mengungkapkan basis valuasi (*lower-of-cost* atau *net realizable value*) dan asumsi aliran biaya yang digunakan (*First In First Out/FIFO* atau *average-cost*)”.

c. “*Prepaid Expenses*”

“Sebuah perusahaan memasukkan biaya dibayar dimuka ke dalam aset lancar jika perusahaan akan menerima manfaat (biasanya jasa) dalam waktu satu tahun atau siklus operasi, mana saja yang lebih lama. *Prepaid expenses* termasuk aset lancar karena jika belum dibayar, maka akan memerlukan penggunaan kas selama tahun berikutnya atau siklus operasi”.

d. “*Short-Term investment*”

“Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang diperdagangkan (baik utang maupun ekuitas) sebagai aset lancar. Perusahaan mengklasifikasikan investasi non-perdagangan individual sebagai aset lancar atau tidak lancar, tergantung pada situasinya. Perusahaan harus melaporkan sekuritas yang dimiliki untuk diperdagangkan pada biaya perolehan diamortisasi”.

- e. “*Cash and cash equivalent*”
“Kas dan setara kas merupakan investasi jangka pendek dan tingkat likuidasi tinggi yang akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang”
2. “*Non-current asset* (aset tidak lancar)”
“Aset tidak lancar merupakan aset yang tidak memenuhi definisi aset lancar”
- a. “*Long-term investment*”
“Investasi jangka panjang sering dirujuk sebagai investasi yang secara normal terdiri dari satu dari empat tipe berikut investasi dalam sekuritas, seperti obligasi, saham biasa, atau wesel jangka panjang; investasi dalam aset berwujud yang tidak sedang digunakan untuk operasi, seperti tanah yang dimiliki untuk spekulasi; investasi yang disisihkan untuk pendanaan khusus, seperti *sinking fund*, dana pensiun, atau pendanaan ekspansi pabrik; dan investasi dalam perusahaan anak non-konsolidasi atau perusahaan asosiasi”
- b. “*Property, plant, and equipment*”
“Aset berwujud yang memiliki umur panjang yang digunakan dalam operasi tetap perusahaan. Aset ini termasuk properti seperti tanah, bangunan, mesin, perkakas, alat, dan *wasting resources* (minerals)”
- c. “*Intangible asset*”
“Aset tak berwujud tidak memiliki komponen fisik dan bukan merupakan instrumen keuangan. *Intangible asset* termasuk *patent, copyright, franchise, goodwill, trademark, trade names*, dan daftar pelanggan”
- d. “*Other assets*”
“Hal-hal yang terkait dalam bagian ini sangat beragam. Dapat terdiri dari *long-term prepaid expenses* dan piutang tak lancar, atau aset dalam pendanaan khusus, kas atau sekuritas yang dibatasi penggunaannya”.

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor energi. Berikut merupakan jenis aset yang hanya terdapat pada perusahaan sektor energi (ADARO,2023).

1. “Aset eksplorasi dan evaluasi”

“Aset eksplorasi dan evaluasi merupakan biaya yang timbul pada tahap awal kegiatan pertambangan, yaitu saat perusahaan melakukan pencarian dan penilaian terhadap potensi sumber daya alam. Biaya ini meliputi kegiatan seperti survei geologi, pengeboran, dan studi kelayakan. Aset ini bersifat khusus karena hanya muncul pada perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan atau energi.”

2. “Properti pertambangan”

“Properti pertambangan mencerminkan aset yang berasal dari kegiatan pengembangan area tambang setelah keberadaan sumber daya dinyatakan layak untuk dieksploitasi. Aset ini mencakup biaya pembukaan lahan dan pengembangan lokasi tambang hingga siap digunakan untuk kegiatan produksi.”

3. “Tambang dalam produksi”

“Tambang dalam produksi merupakan bagian dari properti pertambangan yang telah memasuki tahap operasional dan mulai menghasilkan manfaat ekonomi bagi perusahaan. Aset ini umumnya berkaitan dengan biaya pengembangan lanjutan yang terjadi setelah tambang mulai beroperasi.

4. “Aset infrastruktur tambang”

“Aset infrastruktur tambang merupakan aset yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional pertambangan, seperti jalan tambang, fasilitas pengolahan, dan sarana pendukung lainnya. Meskipun secara klasifikasi termasuk aset tetap, jenis infrastruktur ini memiliki karakteristik yang khas dan tidak umum ditemukan pada sektor selain energi atau pertambangan.”

2.6. Pengaruh Profitabilitas terhadap *ESG score*

Menurut Weygandt et al (2022) “profitabilitas adalah rasio yang mengukur keberhasilan atau operasi suatu perusahaan selama periode waktu tertentu.” semakin tinggi rasio profitabilitas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan semakin tinggi juga laba yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Laba perusahaan yang tinggi menandakan perusahaan memiliki cukup dana sehingga perusahaan dapat lebih banyak melakukan kegiatan sosial dan lingkungan, artinya semakin

banyak juga hal-hal yang dapat dilaporkan dalam sustainability report. Penjelasan ini sesuai dengan teori stakeholder bahwa perusahaan diharuskan untuk berperan aktif terhadap aktivitas sosial karena stakeholder menginginkan informasi terkait kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan” (Gunawan & Sjarief, 2022). Sebagai contoh, perusahaan memanfaatkan kapal tongkang dengan penggunaan biosolar B35 untuk meningkatkan efisiensi distribusi batubara. Penggunaan B35 memberikan keuntungan berupa pengurangan emisi serta potensi biaya operasional dan perawatan yang lebih rendah. Pemanfaatan aset tersebut meningkatkan efisiensi operasional, menurunkan COGS, dan mendorong peningkatan laba, sekaligus mencerminkan praktik keberlanjutan melalui efisiensi energi dan sumber daya air. Dengan demikian, semakin tinggi laba yang dihasilkan dari penggunaan aset tersebut, maka semakin tinggi pula tingkat pengungkapan item dalam laporan keberlanjutan. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh (Yohana & Suhendah, 2023) yang menyatakan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan laporan keberlanjutan. Mengacu pada penelitian sebelumnya, hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

H1 = Profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap ESG score.

2.7. Ukuran Perusahaan.

Menurut Yovana & Kadir (2020) “ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan.” Ukuran perusahaan dapat dilihat dari nilai aktiva yang dimiliki oleh perusahaan (Gunawan & Sjarief, 2022). “Perusahaan dengan skala besar biasanya mempunyai sumber daya yang lebih memadai, termasuk kemampuan finansial, manajerial, dan akses ke informasi, sehingga dapat mempermudah dalam menyusun dan menyajikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*)” (Adelita et al., 2024). Klasifikasi ukuran perusahaan menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.43/POJK.04/2020 sebagai berikut:

1. “Emiten dengan aset skala kecil yang selanjutnya disebut emiten skala kecil adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:”

- a. “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, tidak lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah); dan”
 - b. “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:”
 - 1) “Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten dengan aset skala menengah; dan/atau”
 - 2) “Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”
2. “Emiten dengan aset skala menengah yang selanjutnya disebut emiten skala menengah adalah emiten berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:”
- a. “Memiliki total aset atau istilah lain yang setara, lebih dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah); dan”
 - b. “Tidak dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh:”
 - 1) “Pengendali dari emiten atau perusahaan publik yang bukan emiten skala kecil atau emiten skala menengah; dan/atau”
 - 2) “Perusahaan yang memiliki aset lebih dari Rp250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).”

“Ukuran perusahaan menggambarkan skala operasional suatu entitas bisnis, yang biasanya dapat ditentukan dengan indikator yakni jumlah aktiva yang dimiliki, volume penjualan, jumlah karyawan, serta total ekuitas. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini di proksikan dengan logaritma natural total aset. Penggunaan rumus tersebut bertujuan untuk menyederhanakan angka-angka besar dan memastikan data lebih mudah dianalisis secara statistik” (Adelita et al., 2024). Menurut (Yovana & Kadir, 2020), ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \ln (\text{Total Assets}) \quad (2.5)$$

Keterangan:

Total *assets* : Jumlah aset yang dimiliki perusahaan

Menurut Pradnyawati et al (2021) “perhitungan ukuran perusahaan menggunakan log natural total aktiva dengan tujuan menjurangi fluktuasi data yang berlebih. Penggunaan log natural pada jumlah aset dengan nilai ratusan miliar bahkan triliun akan disederhanakan, tanpa mengubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya.” Weygandt et al. (2022) menjelaskan “ciri umum yang dimiliki oleh semua aset adalah kemampuannya untuk memberikan layanan atau manfaat di masa depan. Dalam suatu bisnis, potensi layanan atau manfaat ekonomi di masa depan tersebut pada akhirnya menghasilkan arus kas masuk (pendapatan).” Menurut SAK EMKM (2016), “aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomik di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas.” Aset dapat di bagi menjadi dua jenis, yaitu sebagai berikut:

1. “Aset lancar”

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2021), “aset lancar adalah kas dan aset lain yang diperkirakan akan dikonversi menjadi kas, atau dijual, atau digunakan perusahaan dalam satu tahun atau dalam satu siklus operasi normal, mana yang lebih panjang. Siklus operasi normal perusahaan merupakan periode waktu rata-rata sejak perusahaan memperoleh persediaan hingga perusahaan menerima kas dari penjualan produk tersebut. Siklus tersebut dimulai dari pengeluaran kas untuk membeli persediaan, memproduksi persediaan, mengakui piutang, hingga penerimaan kas dari pelunasan piutang. Ketika siklus operasi tersebut terjadi dalam satu tahun, maka perusahaan biasanya menggunakan periode dua belas bulan. Sebaliknya jika siklus tersebut lebih lama dibanding satu tahun, maka perusahaan menggunakan periode yaitu dua belas bulan.” “Kriteria aset lancar ini lebih rinci dijelaskan dalam PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan, yaitu suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut:”

- a) “Aset tersebut diperkirakan akan direalisasikan, atau terdapat intensi untuk dijual atau digunakan dalam siklus operasi normal. Siklus operasi entitas merupakan jangka waktu antara perolehan aset untuk pemrosesan dan realisasinya menjadi kas atau setara kas. Ketika entitas tidak dapat

mengidentifikasi siklus operasi normal, maka siklus operasi normal diasumsikan dua belas bulan;”

- b) “Aset tersebut dimiliki untuk tujuan diperdagangkan;”
- c) “Aset tersebut diperkirakan akan direalisasikan dalam jangka waktu dua belas bulan; atau”
- d) “Aset tersebut merupakan kas atau setara kas, kecuali aset tersebut dibatasi pertukaran atau penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas, sekurang-kurangnya dua belas bulan setelah periode pelaporan.”

“Sebaliknya, jika suatu aset tidak termasuk dalam kriteria-kriteria di atas maka aset tersebut diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Aset lancar biasanya disajikan dalam laporan posisi keuangan berdasarkan urutan likuiditasnya. Sebagai contoh, urutan penyajiannya aset lancar biasanya dimulai dari kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, persediaan, biaya dibayar di muka. Aset-aset tersebut tidak akan disajikan sebagai aset lancar jika diperkirakan tidak akan direalisasi dalam satu tahun atau siklus operasi normal, mana yang lebih lama. Sebagai contoh, suatu kas ketika penggunaannya dibatasi untuk pembayaran obligasi yang jatuh temponya lima tahun, maka kas tersebut tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar.”

2. “Aset tidak lancar”

“Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) (2021), “aset tidak lancar merupakan aset yang akan memberikan manfaat untuk perusahaan lebih dari satu tahun atau lebih dari satu siklus operasi normal. Aset tidak lancar meliputi properti investasi, aset tetap, aset takberwujud, aset biologis, dan aset keuangan yang bersifat jangka panjang.” SAK EMKM (2016) juga menjelaskan bahwa “beberapa aset memiliki wujud, sementara beberapa aset tidak memiliki wujud (takberwujud). Namun demikian, wujud aset tidak esensial untuk menentukan keberadaan aset.”

a) “Aset berwujud”

“Definisi aset tetap menurut PSAK 16 adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa, untuk

direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif; dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari satu periode.

Berdasarkan definisi tersebut, maka karakteristik aset tetap yaitu:

- 1) “Memiliki wujud fisik;”
- 2) “Digunakan untuk membantu operasional perusahaan; dan”
- 3) “Memiliki masa manfaat lebih dari satu periode.”

“Penggunaan untuk membantu operasional dapat melalui berbagai cara, misalnya:”

- 1) “Penggunaan untuk kegiatan produksi, seperti tanah dan bangunan pabrik, mesin, serta peralatan pabrik lain;”
 - 2) “Penggunaan dalam penyediaan jasa, seperti tanah dan bangunan kantor, kendaraan operasional, mesin cuci di bisnis laundry, serta mesin jahit di bisnis butik;”
 - 3) “Disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi, seperti mesin, kendaraan, dan peralatan kantor yang disewakan kepada pihak lain. Namun pemanfaatan melalui sewa ini tidak berlaku untuk tanah dan bangunan. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui sewa operasi merupakan properti investasi; dan”
 - 4) “Penggunaan untuk tujuan administratif, seperti komputer, laptop, printer, dan mesin *foto copy*.”
- b) “Aset tak berwujud”

“Seringkali perusahaan mengeluarkan sumber daya dalam rangka perolehan, pengembangan, pemeliharaan atau peningkatan sumber daya tidak berwujud, seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, desain, atau implementasi sistem baru. Pengeluaran sumber daya tersebut akan diakui sebagai aset takberwujud jika memenuhi definisi aset takberwujud, yaitu keteridentifikasi, pengendalian, dan adanya manfaat ekonomis masa depan. Jika terdapat unsur yang tidak terpenuhi, maka pengeluaran sumber daya tersebut diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Contoh dari aset takberwujud adalah piranti lunak komputer, paten, hak cipta, film, daftar

pelanggan, waralaba, loyalitas pelanggan, dan hak pemasaran.” Berikut penjelasan dari tiga unsur aset tak berwujud:

1) “Keteridentifikasian”

“PSAK 19 mengatur mengenai apa yang dimaksud dengan keteridentifikasian. Suatu aset dikatakan dapat diidentifikasi ketika:”

- a. “Dapat dipisahkan atau dibedakan dari perusahaan dan dijual, dialihkan, dilisensikan, disewakan atau ditukarkan, baik secara tersendiri atau bersama dengan kontrak terkait, aset atau liabilitas teridentifikasi, terlepas apakah entitas bermaksud untuk melakukan hal tersebut, atau”
- b. “Timbul dari kontrak atau hak legal lainnya, terlepas dari apakah hak tersebut dapat dialihkan atau dipisahkan dari entitas atau dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban lainnya.”

2) “Pengendalian”

“Perusahaan mengendalikan aset jika perusahaan:”

- a. “Memiliki kemampuan untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan yang timbul dari aset tersebut, dan”
- b. “Dapat membatasi akses pihak lain dalam memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset tersebut.”

“Pada umumnya pengendalian atas aset tak berwujud timbul dari hak legal yang memiliki kekuatan hukum. Tapi kekuatan hukum dari hak atas aset ini bukan merupakan syarat mutlak dari suatu pengendalian karena perusahaan dapat memperoleh pengendalian atas suatu aset takberwujud melalui cara lain. Perusahaan seringkali memiliki karyawan yang terampil dan memiliki program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan karyawan. Karyawan yang terampil dan pengeluaran untuk program pelatihan tidak dapat dikapitalisasi dan diakui sebagai aset takberwujud perusahaan. Hal ini disebabkan karena perusahaan belum tentu dapat mengendalikan manfaat ekonomik masa depan dari karyawan terampil tersebut dan program pelatihan yang diadakan perusahaan. Perusahaan tidak dapat memastikan bahwa

karyawan tersebut akan tetap bekerja di perusahaan di masa depan. Karyawan bisa meninggalkan perusahaan kapanpun mereka mau, terlepas terdapat kontrak yang mengikat karyawan tersebut untuk bekerja dalam jangka waktu tertentu atau tidak.”

3) “Manfaat ekonomik masa depan”

“Manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset tak berwujud tidak selalu muncul dari pendapatan dari penjualan barang atau jasa, tetapi juga bisa dapat melalui penghematan biaya. Misalnya, aset takberwujud yang berupa hak kekayaan intelektual dalam kegiatan produksi mengakibatkan kegiatan produksi dapat berjalan lebih efisien. Manfaat ekonomik masa depan dari aset takberwujud juga bisa muncul dari manfaat lain dari penggunaan aset tersebut, misalnya penggunaan sistem informasi yang terintegrasi di perusahaan yang mengakibatkan kinerja perusahaan lebih efektif dan efisien.”

2.8. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *ESG Score*

Ukuran perusahaan yang semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki aset yang lebih besar dalam mendukung kegiatan operasionalnya. Besarnya aset yang dimiliki, mencerminkan kapasitas perusahaan untuk menerapkan prinsip keberlanjutan. Contohnya seperti membangun infrastruktur energi terbarukan seperti PLTA untuk mendukung kawasan industri hijau (*green industry*). Energi tersebut digunakan untuk menunjang kegiatan operasional industri, seperti mesin produksi, smelter, alat berat, dan fasilitas lainnya yang membutuhkan energi besar. Kawasan industri hijau juga dilengkapi dengan fasilitas ramah lingkungan seperti pengolahan limbah, efisiensi energi, dan jaringan listrik berbasis energi terbarukan guna mengurangi emisi karbon. Pengembangan aset strategis seperti ini umumnya dilakukan oleh perusahaan besar karena membutuhkan pendanaan, teknologi, dan aset yang besar dalam menerapkan prinsip keberlanjutan. Penerapan aktivitas keberlanjutan tersebut kemudian akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan lebih banyak informasi dan item keberlanjutan dalam laporan keberlanjutan perusahaan. Berdasarkan Yovana &

Kadir (2020) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

H₂ = Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap ESG score.

2.9. Leverage

Menurut Gunawan & Sjarief (2022) *leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset suatu perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* menunjukkan seberapa besar entitas mengalokasikan utang yang di pinjam dalam membiayai aktivitas operasional (Adelita et al, 2024). Tujuan dan manfaat rasio *Leverage* adalah untuk memilih menggunakan modal sendiri atau modal pinjaman dengan menggunakan beberapa perhitungan. Penggunaan modal sendiri atau dari modal pinjaman akan memberikan dampak tertentu bagi perusahaan. Pengaturan rasio *leverage* yang baik akan memberikan banyak manfaat bagi perusahaan guna menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun semua kebijakan ini tergantung dari tujuan perusahaan secara keseluruhan.”

“Rasio *leverage*, yaitu rasio untuk mengukur sampai seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai dari hutang. “Jenis-jenis rasio *leverage* menurut Kasmir (2008) dalam Buntu (2023) yaitu :

a. “*Debt to Assets Ratio.*”

“*Debt ratio* merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva. Caranya adalah dengan membandingkan antara total utang dan total aktiva. Standar rasio industri untuk *debt to assets ratio* adalah 35%.”

b. “*Debt to Equity Ratio.*”

“*Debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditor) dengan pemilik

perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Standar rasio industri untuk *debt to equity ratio* yaitu 90%.”

c. “*Times Interest Earned Ratio.*”

“*Times Interest Earned* atau jumlah kali perolehan bunga merupakan rasio untuk mengukur sejauhmana pendapatan dapat menurun tanpa membuat perusahaan merasa malu karena tidak mampu membayar biaya bunga tahunannya. Apabila perusahaan tidak mampu membayar bunga, dalam jangka panjang menghilangkan kepercayaan kepada kreditor. Bahkan ketidakmampuan menutup biaya tidak menutup kemungkinan akan mengakibatkan adanya tuntutan hukum dari kreditor. Lebih dari itu, kemungkinan perusahaan menuju ke arah pailit semakin besar. Standar rasio industri untuk *times interest ratio* adalah 10 kali setiap tahunnya.”

Rasio *leverage* dalam penelitian ini menggunakan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER). “Menurut teori *stakeholder*, perusahaan dengan praktik ESG yang baik mampu meningkatkan kepercayaan investor dan kreditor sehingga risiko perusahaan dipersepsikan lebih rendah. Kondisi tersebut mempermudah perusahaan memperoleh sumber pendanaan yang lebih efisien dan pada akhirnya memengaruhi struktur modal yang tercermin melalui *Debt to Equity Ratio* (DER)” (Oktrivina et al., 2025). Dengan kata lain rasio ini untuk mengetahui setiap rupiah yang dijadikan untuk jaminan utang. “*Debt to Equity Ratio* dihitung dengan rumus sebagai berikut (Weygandt et al., 2022):”

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}} \quad (2.6)$$

Keterangan:

Total *debt* : Total utang suatu perusahaan.

Total *equity* : Total ekuitas suatu perusahaan.

Menurut Kieso et al. (2024), contoh dari *current liabilities* yaitu:

a. *“Accounts Payable”*

“Saldo yang terhutang pada pihak lain yang terkait untuk barang dagang, persediaan, atau jasa yang dibeli tanpa melakukan pembayaran. Utang dagang timbul karena adanya jeda antara penerimaan jasa dan perolehan hak atas aset dengan waktu pembayaran”.

b. *“Notes Payable”*

“Perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang telah ditentukan di masa yang akan datang”.

c. *“Current maturities of long term debts”*

“Bagian dari obligasi, wesel hipotek, dan utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya”.

d. *“Short terms obligations expected to be refinanced”*

“kewajiban jangka pendek yang diekspektasikan akan dibiayai kembali”

e. *“Dividends payable”*

“Jumlah terutang oleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai hasil otorisasi dewan direksi”.

f. *“Customer advances and deposits”*

“Utang lancar berupa setoran tunai yang dapat dikembalikan yang diterima dari pelanggan dan karyawan. Perusahaan dapat menerima setoran dari pelanggan untuk menjamin pelaksanaan suatu kontrak atau layanan, atau sebagai jaminan untuk menutup pembayaran kewajiban di masa depan yang diperkirakan”.

g. *“Unearned revenue”*

“pembayaran yang diterima sebelum barang atau jasa diberikan kepada pelanggan”.

h. *“Sales and value add taxes payable”*

“Kewajiban yang timbul dari pajak yang harus dipungut oleh perusahaan atas penjualan barang atau jasa, yang kemudian nantinya akan disetorkan kepada pemerintah”.

i. *“Income tax payable”*

“Pajak penghasilan dalam siklus normal operasi perusahaan yang harus dibayarkan oleh perusahaan”.

j. *“Employee-related liabilities”*

“Jumlah terutang kepada karyawan untuk gaji atau upah yang dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Kewajiban lancar yang berhubungan dengan kompensasi karyawan juga termasuk pemotongan gaji, absensi yang dikompensasi, dan bonus”.

Menurut Kieso et al. (2024), berikut adalah contoh dari *non-current liabilities*:

a. *“Bonds payable”*

“Janji untuk melakukan pembayaran sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang sudah ditentukan dan ditambah bunga berkala pada tingkat yang sudah ditentukan”.

b. *“Long-terms note payable”*

“Perjanjian tertulis untuk membayar sejumlah uang tertentu pada tanggal yang ditentukan di masa yang akan datang. Utang wesel jangka panjang memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun”.

c. *“Mortgages payable”*

“Utang jangka panjang yang menggunakan hak milik atas properti sebagai jaminan atas pinjaman”.

Equity adalah total aset dikurangi total kewajiban” (Weygandt et al., 2022).

Menurut Kieso et al (2024) “ekuitas terdiri dari”:

a. *“Share Capital”*

“Par atau *stated value* dari saham yang diterbitkan. Termasuk di dalamnya saham biasa dan saham preferen.”

b. *“Share Premium”*

“Kelebihan dari jumlah yang dibayarkan atas par atau *stated value*.”

- c. *“Retained Earnings”*
“Penghasilan perusahaan yang tidak di distribusikan.”
- d. *“Accumulated Other Comprehensive Income”*
“Jumlah agregat dari item pendapatan komprehensif lainnya.”
- e. *“Treasury Shares”*
“Jumlah saham biasa yang dibeli kembali.”
- f. *“Non-controlling interest (minority interest)”*
“Bagian ekuitas perusahaan anak yang tidak dimiliki oleh perusahaan pelapor.”

Pada penelitian ini menggunakan objek perusahaan sektor energi. Berikut merupakan jenis liabilitas yang hanya terdapat pada perusahaan sektor energi (ADARO,2023).

1. *“Liabilitas reklamasi dan penutupan tambang (provision for mine reclamation and closure)”*
“Liabilitas ini merupakan kewajiban perusahaan untuk melakukan pemulihan lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Kewajiban ini timbul karena adanya regulasi pemerintah yang mengharuskan perusahaan untuk mengembalikan kondisi lingkungan seperti semula. Oleh karena itu, perusahaan mengakui provisi atas biaya reklamasi dan penutupan tambang sejak kegiatan produksi dimulai.”
2. *“Liabilitas pengelolaan lingkungan (environmental liabilities)”*
“Liabilitas ini berkaitan dengan kewajiban perusahaan dalam menangani dampak lingkungan yang timbul dari aktivitas operasional, seperti pengelolaan limbah dan pemulihan kerusakan lingkungan. Liabilitas ini mencerminkan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan yang menjadi perhatian utama dalam industri energi.”
3. *“Liabilitas kontrak jangka panjang sumber daya (long term resource contracts / take or pay obligations).”*
“Perusahaan energi sering memiliki kontrak jangka panjang yang mengharuskan pembayaran minimum tertentu, baik sumber daya tersebut digunakan atau tidak (*take or pay*). Kewajiban ini menjadi liabilitas karena

perusahaan tetap harus melakukan pembayaran sesuai kontrak, sehingga meningkatkan risiko keuangan.”

4. “Liabilitas pembongkaran aset (*asset retirement obligation*).”

“Liabilitas ini merupakan kewajiban untuk membongkar, memindahkan, dan memulihkan lokasi aset setelah masa manfaatnya berakhir. Dalam sektor pertambangan, kewajiban ini umumnya terkait dengan fasilitas tambang, infrastruktur, dan peralatan yang harus dibersihkan setelah tidak digunakan.”

2.10. Pengaruh *Leverage* terhadap *ESG Score*

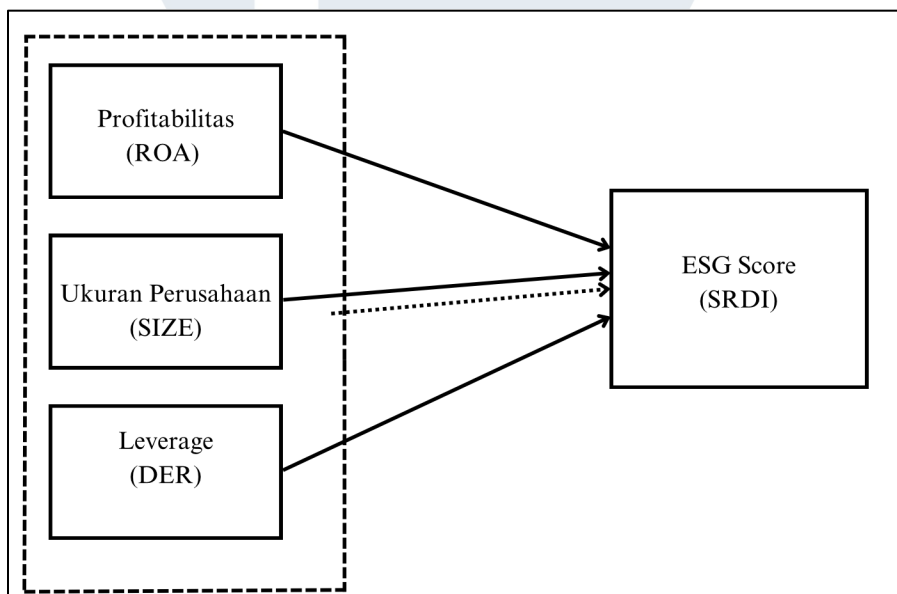
Menurut Adelita et al (2024) “*leverage* yaitu tingkat ketergantungan perusahaan terhadap pembiayaan utang. *Leverage* menunjukkan seberapa besar entitas mengalokasikan utang yang di pinjam dalam membiayai aktivitas operasional. Entitas dengan *leverage* yang tinggi sering mengabaikan pengungkapan yang menimbulkan biaya tambahan bagi perusahaan. Karena lebih berfokus pada pengembalian kewajiban dibanding mengungkapkan informasi keberlanjutan.” Contohnya, perusahaan melakukan berbagai aktivitas keberlanjutan seperti rehabilitasi Daerah Aliran Sungai (DAS) untuk mendukung kepatuhan terhadap Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH), pemantauan kualitas udara dan emisi secara rutin, serta pengolahan limbah melalui inovasi ramah lingkungan. Selain itu, perusahaan juga menjalankan program CSR di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, budaya, dan lingkungan menggunakan pendanaan internal perusahaan. Dengan kondisi keuangan yang lebih stabil dan rendahnya tekanan utang terhadap bunga, perusahaan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mengalokasikan dana untuk kegiatan keberlanjutan sehingga pengungkapan *ESG score* dalam *sustainability report* dapat dilakukan secara lebih luas dan lengkap. Hal ini sejalan penelitian yang dilakukan oleh Adelita et al., (2024). Mengacu pada penelitian sebelumnya, hipotesis yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah

H3 = Leverage berpengaruh negatif terhadap ESG score.

2.11. Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan *Leverage* Secara Simultan terhadap *ESG Score*

Berdasarkan Gunawan & Sjarief (2022), “profitabilitas (ROA) dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*”. Kemudian, dari penelitian Yohana & Suhendah (2023) “*leverage* (DER) dan profitabilitas (ROA) berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*”. Lalu menurut Putry & Meli, (2025) “ukuran perusahaan dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*”. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa profitabilitas, ukuran perusahaan, dan *leverage* berpengaruh secara simultan terhadap pengungkapan *sustainability report*.

2.12. Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Sumber data: Data Peneliti